



# LKJIP 2023

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERTANIAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Jl. Ahmad Yani Nomor.04 Pangkalan Bun Kode Pos 74113  
Kalimantan Tengah  
Telepon / Faxes (0532) 21465  
Email : [distan.kabkobar@gmail.com](mailto:distan.kabkobar@gmail.com)



# KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian Tahun 2023. LKjIP Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas publik pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah

Sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian berupaya memenuhi ketentuan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tatacara Rivi Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kami sadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan, karena itu kritik saran dan masukan dari berbagai pihak sangat diharapkan demi perbaikan ke depan. Diharapkan laporan ini dapat bermanfaat dan kepada semua pihak yang turut membantu penyusunan laporan ini diucapkan terima kasih.

Pangkalan Bun, 29 Februari 2024

Kepala Dinas Pertanian

Kabupaten Kotawaringin Barat,



**Ir. KRIS BUDI HASTUTI**  
**NIP.19660318 199003 2 008**



# IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam APBD, dalam penyusunannya Laporan Kinerja ini berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja dan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 243 Tahun 2019 tentang Penetapan Sistematis Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Capaian kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 dalam mewujudkan sasaran strategis digambarkan dalam tabel berikut ini:

NO	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tahun 2023	Satuan	Target Kinerja Sampai dengan	Realisasi Kinerja Sampai Dengan	Capaian Kinerja Sampai dengan bulan evaluasi
					2023	2023	
1	Meningkatnya produksi komoditi pertanian	Jumlah Produksi Komoditi Pertanian (ton)	155.146,02	Ton	155.146,02	156.341,00	100,77
		Jumlah Produksi Komoditi Tanaman Pangan (ton)	11.707,32	Ton	11.707,32	6.645,00	56,76
		Jumlah Produksi Komoditi Hortikultura (ton)	32.352,83	Ton	32.352,83	37.707,00	116,55
		Jumlah Produksi Komoditi Perkebunan Rakyat (ton)	98.784,95	Ton	98.784,95	98.822,00	100,04
		Jumlah Produksi Komoditi Peternakan (ton)	12.300,93	Ton	12.300,93	13.167,00	107,04
2	Meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Aparatur/ Masyarakat	77	%	77	83,67	108,66
	RERATA CAPAIAN KINERJA						104,72

Dari tabel diatas disimpulkan bahwa capaian kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Barat tahun anggaran 2023 sebesar **104,72%** dengan peringkat kinerja sangat tinggi.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Barat ke depan, sebagai berikut:

- 1.Ketergantungan terhadap sub sektor Perkebunan yang terlalu besar (80,85%) sehingga ketika terjadi gejolak harga komoditas perkebunan maka berpengaruh sangat besar pada PDRB Sektor Pertanian,Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan;
- 2.Intensitas pemeliharaan tanaman rendah, karena pengetahuan budidaya petani yang masih minim, kemampuan pembiayaan untuk pemeliharaan yang kurang;
- 3.Produk komoditas petani belum memberikan nilai tambah yang maksimal karena hanya dijual dalam bentuk bahan mentah;
- 4.Keberadaan tanaman berumur tua/kurang produktif khususnya sawit, karet, kelapa, dan kopi.;
- 5.Belum tertatanya kawasan pengembangan Pertanian dan Perkebunan yang telah sesuai dengan tata ruang wilayah, sehingga belum adanya kawasan yang terintegrasi secara spesifik dan terpadu untuk pengembangan Kawasan Pertanian dan Perkebunan secara regulasi

a. Langkah-langkah antisipatif yang telah diambil :

- 1.Telah dilaksanakan focus pengembangan dan penguatankomoditas tanaman pangan sebagai komoditas pokok dan komoditas hortikultura sebagai penyangga inflasi dan alternatif untuk meningkatkan ekonomi melalui APBD dan APBN Tahun 2023.
- 2.Telah dilaksanakannya penyuluhan pertanian secara intensif baik secara luring dan daring ke kelompok tani/GAPOKTAN perihal GAP (Good Agriculture Practice) sebagai upaya peningkatan produksi dan produktivitas pertanian.
- 3.Telah dilaksanakan pendampingan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian ke kelompok pengolahan hasil pertanian
- 4.Telah dilaksanakan Replanting tanaman perkebunan rakyat yang sudah tidak produktif melalui skema PSR dari BPPDKS Kementrian Pertanian
- 5.Telah dilakukan Review RTRW dan sinkronisasi dengan LP2B serta regulasi penyelesaian tumpang tindih serta keterlanjuran perkebunan dalam areal kawasan hutan

# Daftar Isi

**Kata Pengantar** 01

---

**Ikhtisar Eksekutif** 02

---

**Daftar Isi** 04

---

## **BAB I Pendahuluan**

Latar Belakang

Data Umum

Aspek Strategis

Permasalahan Utama

Landasan Hukum

Sistematika Penyajian 24

---

## **BAB II Perencanaan Kinerja**

Rencana Strategis Dinas Pertanian

Indikator Kinerja Utama

Rencana Kinerja Tahunan

Perjanjian Kinerja

Instrumen Pendukung Capaian Kinerja 40

---

## **BAB III Akuntabilitas Kinerja**

Capaian Kinerja Dinas Pertanian

Analisis Capaian Kinerja

Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Standar Nasional

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Realisasi Keuangan 71

---

**BAB IV Penutup** 72

---

# BAB I

## PENDAHULUAN LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Instansi Pemerintah wajib meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna dan bertanggung jawab. Adanya tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah beserta pencapaian kinerjanya menjadi bagian upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai bentuk perwujudan sistem tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) pemerintah dalam mempertanggungjawabkan pencapaian visi misi organisasi.

Penyusunan laporan kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2023 ini berpedoman pada Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 243 Tahun 2019 tentang Penetapan Sistematis Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan menyajikan pencapaian, pengukuran dan evaluasi atas perencanaan dan perjanjian kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Barat dalam mewujudkan birokrasi yang akuntabel, transparan, dan profesional.

Tujuan penyajian laporan kinerja ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Barat untuk meningkatkan kinerjanya.





## DATA UMUM



Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan pelaksana Pemerintah Kabupaten, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. Hal ini termuat dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat 94 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Barat. Untuk melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang prasarana, sarana, bidang tanaman pangan, bidang hortikultura dan bidang perkebunan, peternakan, serta kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
2. penyusunan kebijakan dan program penyuluhan pertanian;
3. pengembangan prasarana pertanian;
4. pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih/bibit tanaman pangan, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
5. pengawasan penggunaan sarana pertanian;
6. pembinaan produksi di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
7. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
8. pengendalian dan penanggulangan bencana bidang pertanian;
9. pembinaan panen, pasca panen pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
10. pelaksanaan penyuluhan pertanian;
11. pemberian rekomendasi/pertimbangan perizinan usaha di bidang pertanian;
12. pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian;
13. pelaksanaan administrasi dinas pertanian;
14. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.





Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional, maka Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat menyetarakan Jabatan Administrator Pengawas menjadi Jabatan Fungsional Ahli Muda.

Terkait dengan penyetaraan tersebut di atas, nomenklatur Dinas Pertanian mengalami perubahan dua kali yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Barat per tanggal 11 April 2022

Perubahan nomenklatur tersebut tidak langsung diberlakukan karena dengan adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ Tanggal 14 September 2022 Hal Persetujuan Menteri Dalam Negeri Kepada Pelaksana Tugas/Penjabat/Penjabat Sementara Kepala Daerah dalam Aspek Kepegawaian Perangkat Daerah dan Surat Kepala Badan Kependidikan Nasional Nomor 3915/B-AK.03/SD/K/2022 Tanggal 31 Oktober 2022, mensyaratkan bahwa daerah yang dijabat oleh Penjabat Bupati dalam hal pengangkatan, pemberhentian dan mutasi pegawai perlu ada persetujuan dari Menteri dalam Negeri dan Pertimbangan Teknis dari Badan Kepegawaian Negara. Sehingga untuk melakukan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian masih merujuk pada Peraturan Bupati Kotawaringin Barat 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Barat.



Sampai dengan 31 Desember 2023, Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Barat didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 171 orang Pegawai sebagaimana data berikut:

NO	Jabatan	Jumlah Pegawai	Janis Kelamin		Kualifikasi				Status Pegawai	
			Laki-Laki	Perempuan	S2	S1	D3	SMA	PNS/CPNS/P3K	Kontrak
A	Jabatan Pimianan Tinggi	1		1		1			1	
B	Jabatan Administrator									
	1.Administrator	7	4	3	3	4			7	
	2. Pengawas	5	4	1	1	2	1	1	5	
	3. Pelaksana	70	43	27		11	7	3	21	49
C	Jabatan Fungsional	88	58	30	13	66	1	8	88	
	Jumlah	171	109	62	17	84	9	12	122	49

Kebutuhan pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Barat baik jabatan pelaksana dan jabatan fungsional tertentu berdasarkan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 123 Tahun 2020 tentang Penetapan Peta Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, apabila dibandingkan dengan kondisi yang ada dapat dilihat sebagaimana tabel berikut

Jabatan	Formasi Sesuai Keputusan	Kondisi Saat Ini	Kekurangan
Kepala Dinas	1	1	0
Sekretaris	1	1	0
Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1	1	0
Penelaah Teknis Kebijakan	2	0	2
Pengolah Data dan Informasi	3	1	2
Pengadministrasi Perkantoran	3	1	2
JF Pranata SDM Aparatur Terampil	1	0	1
JF Pranata SDM Aparatur Mahir	1	0	1
JF Pranata SDM Aparatur Penyelia	1	0	1
JF Arsiparis Terampil	1	0	1
JF Arsiparis Mahir	1	0	1
JF Arsiparis Penyelia	1	0	1
JF Pengawas Keuangan Negara	2	0	2
JF Pranata Komputer Pertama	1	0	1
JF Perencana Pertama	3	0	3

Jabatan	Formasi Sesuai Keputusan	Kondisi Saat Ini	Kekurangan
JF Perencana Muda	2	1	1
JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Pertama	2	0	2
JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Muda	3	1	2
Penyuluh Pertanian Pemula	1	1	0
Penyuluh Pertanian Terampil	24	3	21
Penyuluh Pertanian Mahir	18	0	18
Penyuluh Pertanian Penyelia	12	1	11
Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	31	14	17
Penyuluh Pertanian Ahli Muda	25	25	0
Penelaah Teknis Kebijakan	5	2	3
Pengolah Data dan Informasi	3	2	1
Pengadministrasi Perkantoran	2	0	2
JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Madya	1	0	1
JF Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Madya	2	0	2
JF Pengawas Benih Tanaman Madya	6	0	6
JF Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Madya	6	0	6
JF Penyuluh Pertanian Madya	19	19	0

Jabatan	Formasi Sesuai Keputusan	Kondisi Saat Ini	Kekurangan
JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Madya	10	0	10
JF Analis Pasar Hasil Pertanian Madya	10	0	10
JF Pengawas Bibit Ternak Madya	4	1	3
JF Pengawas Mutu Pakan Madya	4	1	3
JF Medik Veteriner Madya	6	1	5
Kepala Bidang Prasarana dan Sarana	1	1	0
JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Pertama	6	0	6
JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Muda	3	1	2
JF Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Pertama	4	0	4
JF Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Muda	4	4	0
JF Pengawas Mutu Pakan Pertama	6	0	6
JF Pengawas Mutu Pakan Muda	4	2	2
Penelaah Teknis Kebijakan	6	1	5
Pengolah Data dan Informasi	2	0	2
Pengadministrasi Perkantoran	2	0	2
Kepala Bidang Tanaman Pangan	1	1	0
JF Pengawas Benih Tanaman Pemula	0	0	0
JF Pengawas Benih Tanaman Pemula	4	0	4

Jabatan	Formasi Sesuai Keputusan	Kondisi Saat Ini	Kekurangan
JF Pengawas Benih Tanaman Penyelia	4	0	4
JF Pengawas Benih Tanaman Pertama	6	0	6
JF Pengawas Benih Tanaman Muda	4	0	4
JF Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Terampil	4	0	4
JF Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Mahir	4	0	4
JF Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Penyelia	4	0	4
JF Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pertama	6	0	6
JF Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Muda	4	1	3
JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Terampil	4	0	4
JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Mahir	4	0	4
JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Penyelia	4	0	4
JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pertama	6	1	5
JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Muda	4	0	4
JF Analis Pasar Hasil Pertanian Terampil	4	0	4
JF Analis Pasar Hasil Pertanian Mahir	4	0	4
JF Analis Pasar Hasil Pertanian Penyelia	4	0	4
JF Analis Pasar Hasil Pertanian Pertama	6	0	6

Jabatan	Formasi Sesuai Keputusan	Kondisi Saat Ini	Kekurangan
JF Analis Pasar Hasil Pertanian Muda	4	1	3
Penelaah Teknis Kebijakan	3	0	3
Pengolah Data dan Informasi	3	0	3
Kepala Bidang Hortikultura	1	1	0
JF Pengawas Benih Tanaman Pemula	0	0	0
JF Pengawas Benih Tanaman Terampil	4	0	4
JF Pengawas Benih Tanaman Mahir	4	0	4
JF Pengawas Benih Tanaman Penyelia	4	0	4
JF Pengawas Benih Tanaman Pertama	6	0	6
JF Pengawas Benih Tanaman Muda	4	0	4
JF Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Terampil	4	0	4
JF Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Mahir	4	0	4
JF Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Penyelia	4	0	4
JF Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pertama	6	0	6
JF Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Muda	4	1	3
JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Terampil	4	0	4

Jabatan	Formasi Sesuai Keputusan	Kondisi Saat Ini	Kekurangan
JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Mahir	4	0	4
JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Penyelia	4	0	4
JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pertama	6	0	6
JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Muda	4	1	3
JF Analis Pasar Hasil Pertanian Terampil	4	1	3
JF Analis Pasar Hasil Pertanian Mahir	4	0	4
JF Analis Pasar Hasil Pertanian Penyelia	4	0	4
JF Analis Pasar Hasil Pertanian Pertama	6	0	6
JF Analis Pasar Hasil Pertanian Muda	4	1	3
Penelaah Teknis Kebijakan	3	1	2
Pengolah Data dan Informasi	2	2	0
Pengadministrasi Perkantoran	1	0	1
Kepala Bidang Perkebunan	1	1	0
JF Pengawas Benih Tanaman Pemula	0	0	0
JF Pengawas Benih Tanaman Terampil	4	0	4
JF Pengawas Benih Tanaman Mahir	4	0	4
JF Pengawas Benih Tanaman Penyelia	4	0	4
JF Pengawas Benih Tanaman Pertama	6	0	6

Jabatan	Formasi Sesuai Keputusan	Kondisi Saat Ini	Kekurangan
JF Pengawas Benih Tanaman Muda	4	0	4
JF Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Terampil	4	0	4
JF Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Mahir	4	0	4
JF Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Penyelia	4	0	4
JF Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pertama	6	0	6
JF Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Muda	4	1	3
JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Terampil	4	0	4
JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Mahir	4	0	4
JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Penyelia	4	0	4
JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pertama	6	0	6
JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Muda	4	1	3
JF Analis Pasar Hasil Pertanian Terampil	4	0	4
JF Analis Pasar Hasil Pertanian Mahir	4	0	4
JF Analis Pasar Hasil Pertanian Penyelia	4	0	0
JF Analis Pasar Hasil Pertanian Pertama	6	0	6
JF Analis Pasar Hasil Pertanian Muda	4	0	4

Jabatan	Formasi Sesuai Keputusan	Kondisi Saat Ini	Kekurangan
Penelaah Teknis Kebijakan	2	2	0
Pengolah Data dan Informasi	2	0	2
Pengadministrasi Perkantoran	1	0	1
Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner	1	1	0
JF Medik Veteriner Muda	3	2	1
JF Paramedik Veteriner Terampil	4	1	3
JF Paramedik Veteriner Mahir	3	1	2
JF Paramedik Veteriner Penyelia	3	0	3
JF Pengawas Mutu Pakan Pertama	6	0	6
JF Pengawas Mutu Pakan Muda	4	1	3
JF Pengawas Mutu Hasi Pertanian Terampil	4	0	4
JF Pengawas Mutu Hasi Pertanian Mahir	4	0	4
JF Pengawas Mutu Hasi Pertanian Penyelia	0	0	0
JF Pengawas Mutu Hasi Pertanian Pertama	6	0	6
JF Pengawas Mutu Hasi Pertanian Muda	4	1	3
JF Analis Pasar Hasil Pertanian Terampil	4	0	4
JF Analis Pasar Hasil Pertanian Mahir	4	0	4
JF Analis Pasar Hasil Pertanian Penyelia	4	0	4

Jabatan	Formasi Sesuai Keputusan	Kondisi Saat Ini	Kekurangan
JF Analis Pasar Hasil Pertanian Pertama	6	0	6
JF Analis Pasar Hasil Pertanian Muda	4	1	3
Penelaah Teknis Kebijakan	2	0	2
Pengolah Data dan Informasi	2	0	2
Pengadministrasi Perkantoran	3	1	2
Kepala UPT Rumah Potong Hewan	1	1	0
Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1	1	0
JF Paramedik Veteriner Terampil	2	1	1
JF Paramedik Veteriner Mahir	3	0	3
JF Paramedik Veteriner Penyelia	2	0	2
JF Medik Veteriner Pertama	3	2	1
JF Medik Veteriner Muda	3	0	3
Penelaah Teknis Kebijakan	2	0	2
Pengolah Data dan Informasi	2	0	2
Pengadministrasi Perkantoran	1	0	1
Kepala UPT Pengembangan Pakan Ternak Unggul	1	1	0
Kepala Kasubag Tata Usaha	1	1	0
JF Pengawas Mutu Pakan Pertama	1	0	1

Jabatan	Formasi Sesuai Keputusan	Kondisi Saat Ini	Kekurangan
JF Pengawas Mutu Pakan Muda	1	0	1
JF Pengawas Bibit Ternak Pertama	1	0	1
JF Pengawas Bibit Ternak Muda	1	0	1
Penelaah Teknis Kebijakan	2	0	2
Pengolah Data dan Informasi	3	0	2
Pengadministrasi Perkantoran	1	0	1
<b>Jumlah</b>	<b>715</b>	<b>125</b>	<b>590</b>

Guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pada tahun 2023, rincian sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai (Rp)
1	Tanah	23	13.160.823.931,00
2	Peralatan & Mesin	3323	20.163.454.315,46
3	Gedung & Bangunan	130	41.105.835.989,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	135	33.133.297.297,22
5	Aset Tetap Lainnya	962	68.922.650,00
6	Aset Lainnya	46	714.956.000,00
7	Konstruksi Dalam Pengerjaan	11	167.522.500,00
<b>TOTAL</b>			<b>108.514.812.682,68</b>



# Aspek Strategis

Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan tugas pokok dan fungsi utamanya berkaitan dengan perumusan kebijakan teknis, pelayanan umum dan pembinaan serta pengembangan dibidang pertanian Kabupaten Kotawaringin Barat. Faktor kunci keberhasilan selain dari suatu unsur organisasi, keberhasilan dan kegagalan strategi, tetapi juga hasil pengembangan informasi yang diperoleh dari unsur perencanaan strategis sebelumnya diidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan.

Berdasarkan analisa SWOT Dinas Pertanian sebagai berikut :

a. Kekuatan/Strengths

- Komitmen pemerintah daerah dalam pengembangan pertanian dalam arti luas dan didukung sinergitas program dan kegiatan pembangunan pertanian dari propinsi dan pusat
- SDM aparatur yang memadai baik dari kuantitas sejumlah 171 orang maupun dari tingkat kompetensi pendidikan
- Petugas penyuluh pertanian yang memadai dari kuantitas sejumlah 57 orang baik dari ASN, Swasta maupun Swadaya maupun dari tingkat jenjang jabatan penyuluhnya

b. Kelemahan/Weaknesses

- Regenerasi tenaga penyuluh yang lambat dimana jumlah penerimaan penyuluh pertanian baru lebih sedikit dibanding dengan penyuluh pertanian yang pensiun/purna tugas
- Pendanaan petani yang lemah yang menyebabkan ketergantungan stimulant bantuan sarana produksi pertanian dalam usaha taninya
- Infrastruktur pertanian yang masih belum memadai

c. Peluang/Opportunities

- Sumber daya lahan yang masih luas
- Permintaan pasar komoditi pertanian yang tinggi baik untuk konsumsi maupun bahan baku industry pengolahan

d. Tantangan/Threats

- Anomali iklim yang tidak stabil
- Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian
- Ancaman Penyakit ternak baik yang zoonosis maupun yang non zoonosis



Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai visi dan misi Dinas Pertanian dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (Strengths – Opportunity) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

#### 1. Strength-Opportunities (SO)

- Optimalisasi produksi dan produktivitas tanaman pangan
- Optimalisasi produksi dan produktivitas hortikultura
- Optimalisasi produksi dan produktivitas perkebunan
- Optimalisasi produksi dan produktivitas peternakan

#### 2. Weakness-Opportunities (WO)

- Optimalisasi kapasitas dan regenerasi SDM
- Optimalisasi dana bergulir melalui skema pembiayaan petani

#### 3. Strength- Threaten (ST)

- Penguatan kapasitas kelembagaan pertanian
- Penguatan mitigasi dalam pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
- Penguatan SDM dan sarana pengendalian penyakit ternak

#### 4. WT

- Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pertanian



## Pemetaan Strategis Dalam Perspektif Balance Scorer Card (BSC) dan Penentuan Strategi Pembangunan

Untuk menentukan pemetaan strategis dalam perspektif BSC untuk menentukan strategis pembangunan seperti tabel di bawah ini :

No	Perspektif	Alternatif Strategi	Strategi
1	Perspektif Masyarakat	Optimalisasi produksi Pertanian (komoditi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan)	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
			Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
			Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
			Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
			Perizinan Usaha Pertanian
			Penyuluhan Pertanian
2	Perspektif proses Internal	Optimalisasi dukungan sarana dan prasarana SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsi	Penyediaan dukungan layanan SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya
3	Perspektif Kelembagaan	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pertanian	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pertanian melalui pelaksanaan penyuluhan pertanian
4	Perspektif Keuangan	Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan anggaran OPD	Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan anggaran OPD

# Permasalahan Utama

Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan unsur penyelenggaraan urusan Pertanian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. Keberhasilan pelaksanaan dipengaruhi oleh sejauh mana mampu memecahkan masalah yang menjadi penghambat dalam mencapai tujuan organisasi. Adapun permasalahan utama yang dihadapi oleh Dinas Pertanian pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Dalam melaksanakan urusannya tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian terdapat beberapa Isu Strategis harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan pertanian. Beberapa isu strategis yang mendesak untuk ditangani tertera pada Tabel sebagai berikut :

No	Permasalahan	Isu Strategis
1	Luasnya lahan tidur/terlantar dan tingginya alih fungsi lahan pertanian serta permasalahan lahan di area kawasan	<b>Produksi dan Produktivitas Pertanian masih rendah</b> merupakan permasalahan yang harus diperbaiki dan ditingkatkan. Usaha-usaha yang akan dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada, baik lahan, infrastruktur sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan pangan daerah melalui peningkatan ketersediaan dan optimalisasi sarana/prasarana produksi pertanian serta penanggulangan OPT, Penyakit Ternak dan Dampak Perubahan Iklim pertanian yang sangat penting untuk mendukung peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dalam menunjang pertumbuhan ekonomi
2	Produksi pertanian belum mampu memenuhi kebutuhan pangan daerah	
3	Ketersediaan sarana dan prasarana produksi pertanian yang kurang memadai	
4	Ancaman OPT dan DPI Pertanian	
5	Masih lemahnya Kapasitas SDM dan Kelembagaan Petani	<b>Daya saing usaha pertanian masih rendah</b> disebabkan oleh Kelembagaan petani yang masih lemah dan masih relatif rendahnya kualitas sumber daya manusia petani; Lemahnya akses petani terhadap permodalan, Lemahnya daya saing mututerdhadap produk – produk pertanian di pasar regional dan nasional disebabkan skala usaha terbatas dengan nilai jual produk masih rendah
6	Akses terhadap pembiayaan dan permodalan masih terbatas	
7	Mutu produk yang dihasilkan belum mampu bersaing dengan produk luar daerah	
8	Skala usaha terbatas dengan nilai jual produk masih rendah	

# Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 243 Tahun 2019 tentang Penetapan Sistematis Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

## Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 melaporkan pencapaian kinerja selama tahun 2023. Capaian kinerja 2023 diukur dan dinilai berdasarkan Perjanjian Kinerja 2023 dan Perjanjian Kinerja Perubahan 2023 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Perjanjian kinerja tahun 2023 merupakan penjabaran Renstra Tahun 2023-2026.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja tahun 2023 memungkinkan dilakukannya identifikasi atas sejumlah celah kinerja (performance gap) sebagai masukan bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti ini, sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 disusun sesuai dengan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 243 Tahun 2019 tentang Penetapan Sistematis Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut:

Kata Pengantar

- i. Ikhtisar Eksekutif
- ii. Daftar isi
- iii. Daftar Tabel

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Data Umum
- 1.3 Aspek Strategis
- 1.4 Permasalahan Utama
- 1.5 Sistematika Penyajian

Bab II Perencanaan Kinerja

- 2.1 Rencana Strategis
- 2.2 Indikator Kinerja Utama
- 2.3 Rencana Kinerja Tahunan
- 2.4 Perjanjian Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

- 3.1 Capaian Kinerja Perangkat Daerah
- 3.2 Realisasi Anggaran

Bab IV Penutup

- 4.1 Kesimpulan
- 4.2 Solusi Atas Permasalahan

Lampiran-lampiran

# BAB II

## PERENCANAAN KINERJA

### Rencana Strategis Dinas Pertanian

Rencana Strategis berisi penjabaran operasional dari RPD 2023-2026 yang tercascade pada tujuan, sasaran dan program kegiatan kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Barat selama lima tahun. Tahun 2023 ini merupakan tahun awal masa pelaksanaan RPD Kabupaten Kotawaringin Barat.

Adapun misi Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang bersinggungan dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Barat adalah misi yang **pertama** yaitu:

**Mewujudkan pertanian dalam arti luas yang berorientasi pada pengembangan agroindustri secara berkelanjutan, berbasis potensi dan keunggulan daerah.**

Selanjutnya diterjemahkan menjadi Tujuan RPD yaitu **Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong pengembangan sektor-sektor potensial dan ekonomi kreatif dengan indikator kinerja pertumbuhan ekonomi**, dengan sasaran RPD yaitu **Meningkatnya pertumbuhan sektor potensial dan industri** dengan indikator sasaran **Kontribusi Sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB ( Milyar Rupiah )**

Sasaran RPD tersebut kemudian diterjemahkan menjadi Tujuan SKPD Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai tugas pokok dan fungsinya. Tujuan Jangka Menengah Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Barat yang dirumuskan dalam Renstra Tahun 2023-2026, adalah sebagai berikut :

**Meningkatnya pertumbuhan sub sector tanaman pangan, hortikultura ,perkebunan dan peternakan terhadap PDRB dengan indikator kinerja Nilai sub sector pertanian tanaman pangan , horikultura , perkebunan, peternakan terhadap PDRB (Milyar Rupiah) (ADHK)**

Sasaran strategis kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Barat adalah :

- **Meningkatnya produksi pertanian** dengan indikator sasaran **jumlah produksi tahunan komoditi pertanian**
- **Meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah** dengan indikator sasaran **Indeks Kepuasan Masyarakat/ Aparatur**

Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Barat ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 – 2026.



Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Barat ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 – 2026.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tahunan				Target Akhir Renstra
				2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya pertumbuhan sub sector tanaman pangan, hortikultura perkebunan, dan peternakan terhadap PDRB	Meningkatnya produksi pertanian	Jumlah Produksi Komoditi Pertanian (Ton)	155.146,02	161.987,96	169.131,63	176.590,34	176.590,34



## Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core business) yang diemban.

IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi. Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Barat tertuang dalam tabel 2.2 berikut ini:

Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
Meningkatnya produksi pertanian	Jumlah Produksi Komoditi Pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan)	Indikator ini adalah indikator yang mengukur tingkat kumulatif produksi tahunan seluruh komoditi pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan)	Jumlah Produksi Tahunan Komoditi Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan)	Data Laporan Bulanan SP (Statistik Pertanian)	Dinas Pertanian Kotawaringin Barat
Meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Aparatur	Indikator ini adalah indikator yang mengukur mengenai tingkat layanan penyelenggaraan pemerintahan Dinas Pertanian yang berkualitas, Indikator ini memiliki interpretasi baik ketika meningkat setiap tahunnya	(Indeks kepuasan aparatur : base kuesioner ke SKM sesuai Permenpan 14 2017	Laporan Survey Kepuasan Aparatur	Dinas Pertanian Kotawaringin Barat

# Rencana Kinerja Tahunan

Perencanaan kinerja tahunan diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki. Setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program yang terdiri dari beberapa kegiatan yang merupakan tindakan nyata untuk dilaksanakan pada tahun bersangkutan. Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan dijabarkan di dalam dokumen rencana kerja SKPD.

Hasil dari proses ini berupa Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang kemudian ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja SKPD sebagaimana terlampir. Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pertanian Tahun 2023 tertuang dalam tabel berikut ini:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya produksi pertanian	Jumlah Produksi Komoditi Pertanian (tanaman pangan, hortikultura , perkebunan dan peternakan)	155.146,02
2	Meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat/Aparatur	77%



# Perjanjian Kinerja



Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tahun 2023 telah menyusun Perjanjian Kinerja dengan Bupati Kotawaringin Barat untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya produksi pertanian	Jumlah Produksi Komoditi Pertanian (tanaman pangan, hortikultura , perkebunan dan peternakan)	155.146,02
2	Meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat/Aparatur	77%

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Eselon II, maka struktur program dan kegiatan yang terkait langsung dan penunjang dalam mencapai sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Anggaran Program dan Kegiatan Yang Terkait langsung Dengan Capaian Kinerja Tahun 2023

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>8.339.717.150</b>	<b>11.232.663.157</b>	<b>2.892.946.007</b>
<b>Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>	<b>2.053.920.103</b>	<b>2.681.106.701</b>	<b>627.186.598</b>
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	459.597.350	1.083.065.895	623.468.545
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1.594.322.753	1.598.040.806	3.718.053
<b>Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>3.147.280.473</b>	<b>4.707.120.447</b>	<b>1.559.839.974</b>
Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	234.758.004	1.674.341.235	1.439.583.231
Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	633.456.481	610.470.299	-22.986.182
Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	2.279.065.988	2.422.308.913	143.242.925

<b>Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Sebelum Perubahan (Rp)</b>	<b>Setelah Perubahan (Rp)</b>	<b>Bertambah/ Berkurang (Rp)</b>
<b>Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>49.212.350</b>	<b>207.715.000</b>	<b>158.502.650</b>
Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	49.212.350	207.715.000	158.502.650
<b>Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>100.134.700</b>	<b>106.311.600</b>	<b>6.176.900</b>
Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	100.134.700	106.311.600	6.176.900
<b>Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain</b>	<b>2.989.169.524</b>	<b>3.530.409.409</b>	<b>541.239.885</b>
Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	2.989.169.524	3.530.409.409	541.239.885
<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	<b>13.079.141.657</b>	<b>14.682.527.260</b>	<b>1.603.385.603</b>
<b>Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	<b>849.786.700</b>	<b>2.009.087.800</b>	<b>1.159.301.100</b>
Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	849.786.700	1.050.022.800	200.236.100

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya		959.065.000	959.065.000
<b>Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian</b>	<b>12.200.674.957</b>	<b>12.644.759.460</b>	<b>444.084.503</b>
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	1.799.340.000	2.065.776.336	266.436.336
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	131.480.000	131.480.000	0
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	7.200.623.692	7.302.681.859	102.058.167
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya		75.600.000	75.600.000
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	3.069.231.265	3.069.221.265	-10.000
<b>Kegiatan Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum</b>	28.680.000	28.680.000	0
Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum	28.680.000	28.680.000	0
<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	<b>1.109.174.560</b>	<b>1.146.613.424</b>	<b>37.438.864</b>

<b>Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Sebelum Perubahan (Rp)</b>	<b>Setelah Perubahan (Rp)</b>	<b>Bertambah/ Berkurang (Rp)</b>
<b>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>43.816.000</b>	<b>43.816.000</b>	<b>0</b>
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	43.816.000	43.816.000	0
Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	69.956.700	76.384.800	6.428.100
Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	69.956.700	76.384.800	6.428.100
<b>Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>506.431.396</b>	<b>507.983.596</b>	<b>1.552.200</b>
Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	506.431.396	507.983.596	1.552.200
<b>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>	<b>488.970.464</b>	<b>518.429.028</b>	<b>29.458.564</b>
Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	10.604.800	10.604.800	0
Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	118.339.536	121.332.586	2.993.050
Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	360.026.128	386.491.642	26.465.514

<b>Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Sebelum Perubahan (Rp)</b>	<b>Setelah Perubahan (Rp)</b>	<b>Bertambah/ Berkurang (Rp)</b>
<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	<b>432.555.942</b>	<b>438.542.042</b>	<b>5.986.100</b>
<b>Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</b>	<b>432.555.942</b>	<b>438.542.042</b>	<b>5.986.100</b>
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	149.180.942	155.167.042	5.986.100
• • • Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	20.235.000	20.235.000	0
Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	13.140.000	13.140.000	0
Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	250.000.000	250.000.000	0
<b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>	<b>36.515.720</b>	<b>34.265.720</b>	<b>-2.250.000</b>
<b>Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>36.515.720</b>	<b>34.265.720</b>	<b>-2.250.000</b>
Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	11.725.720	9.475.720	2.250.000

<b>Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Sebelum Perubahan (Rp)</b>	<b>Setelah Perubahan (Rp)</b>	<b>Bertambah/ Berkurang (Rp)</b>
Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	13.110.000	13.110.000	0
Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	11.680.000	11.680.000	0
<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>6.204.883.750</b>	<b>6.015.348.550</b>	<b>-189.535.200</b>
<b>Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>	<b>6.204.883.750</b>	<b>6.015.348.550</b>	<b>-189.535.200</b>
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	353.943.626	353.943.626	11.609.800
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	1.537.015.006	1.335.870.006	201.145.000
Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	4.257.130.000	4.257.130.000	0
Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	6.803.118	6.803.118	0
Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	49.992.000	49.992.000	0
<b>JUMLAH</b>	<b>29.201.988.779</b>	<b>33.549.960.153</b>	<b>4.347.971.374</b>

## Anggaran Program dan Kegiatan Penunjang Tahun 2023

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>25.902.626.221</b>	<b>24.409.088.847</b>	<b>-1.493.537.374</b>
<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>122.047.500</b>	<b>116.823.500</b>	<b>-5.224.000</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	80.370.000	75.186.000	-5.184.000
• Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.960.000	1.960.000	0
• Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.800.000	2.800.000	0
• Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.572.500	2.572.500	0
• Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.700.000	2.700.000	0
• Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.825.000	2.825.000	0
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.820.000	28.780.000	-40.000
<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>22.888.771.961</b>	<b>21.155.939.400</b>	<b>-1.732.832.561</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22.781.688.611	21.059.534.000	-1.722.154.611
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	34.547.350	37.540.400	2.993.050

<b>Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Sebelum Perubahan (Rp)</b>	<b>Setelah Perubahan (Rp)</b>	<b>Bertambah/ Berkurang (Rp)</b>
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	72.536.000	58.865.000	-13.671.000
<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>121.676.020</b>	<b>131.531.020</b>	<b>9.855.000</b>
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6.370.000	6.370.000	0
• Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	98.881.020	98.881.020	0
• Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	16.425.000	16.425.000	0
<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>197.000.000</b>	<b>212.840.000</b>	<b>15.840.000</b>
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	8.880.000	8.880.000	0
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	86.400.000	76.800.000	-9.600.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	101.720.000	127.160.000	25.440.000
<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>512.033.029</b>	<b>639.070.189</b>	<b>127.037.160</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	46.063.346	46.063.346	0
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	114.641.489	114.641.489	0

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	32.450.255	32.450.255	0
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	67.182.939	87.007.099	19.824.160
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	251.695.000	358.908.000	107.213.000
<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>627.948.561</b>	<b>840.844.382</b>	<b>212.895.821</b>
• Pengadaan Mebel	28.184.998	50.708.358	22.523.360
• Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	108.124.977	127.099.759	18.974.782
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	424.309.871	595.707.550	171.397.679
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	52.328.730	52.328.730	0
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.999.985	14.999.985	0
<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.099.570.400</b>	<b>1.016.345.856</b>	<b>-83.224.544</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	700.000	700.000	0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	332.727.000	318.857.456	13.869.544

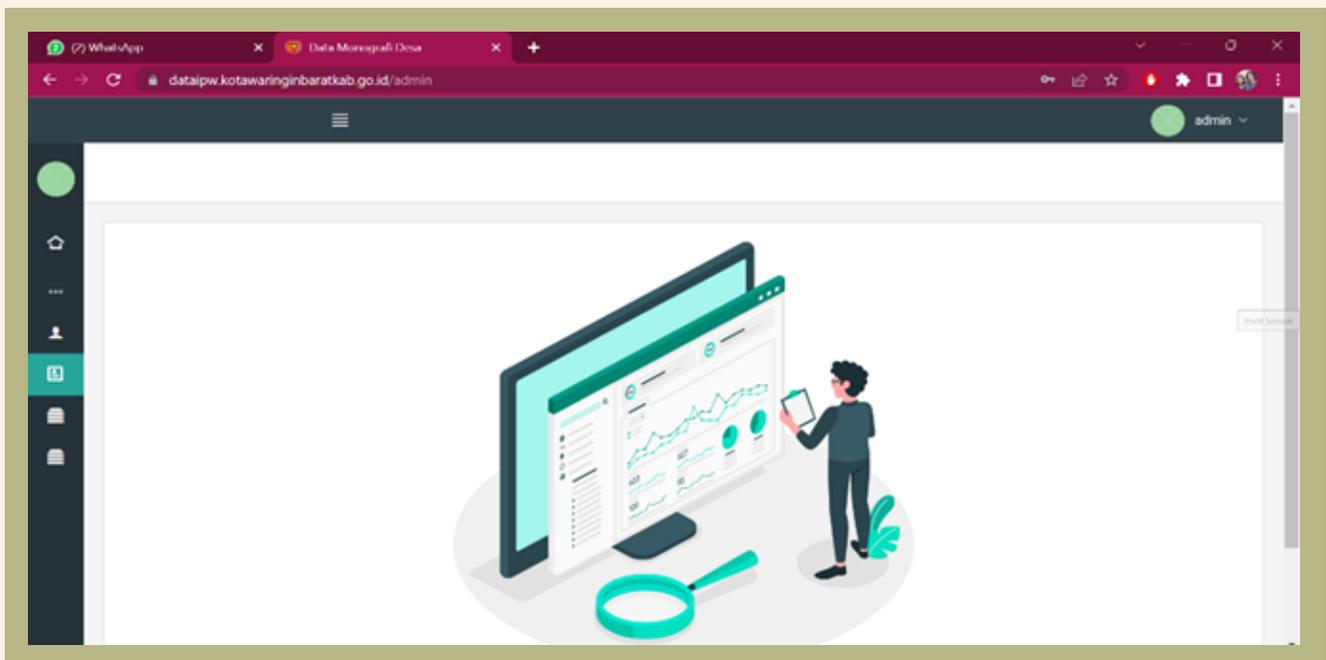
<b>Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Sebelum Perubahan (Rp)</b>	<b>Setelah Perubahan (Rp)</b>	<b>Bertambah/ Berkurang (Rp)</b>
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	766.143.400	696.788.400	69.355.000
<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>333.578.750</b>	<b>295.694.500</b>	<b>-37.884.250</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.783.000	42.783.000	0
• Penyediaan Jasa Pemeliharaan, • Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan • Perizinan Kendaraan Dinas • Operasional atau Lapangan	156.104.000	124.547.750	31.556.250
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	134.691.750	128.363.750	6.328.000
<b>JUMLAH</b>	<b>25.902.626.221</b>	<b>24.409.088.847</b>	<b>-1.493.537.374</b>

# Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Selain anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki beberapa instrumen pendukung berupa aplikasi yang membantu mempercepat pencapaian target kinerja diantaranya:

## 1. Aplikasi SI-TABBE

Aplikasi yang mengintegrasikan data Pertanian meliputi data lahan, budidaya komoditi, sarana dan prasarana serta SDM dan kelembagaan petani yang digunakan untuk pemantauan, pengendalian dan evaluasi pembangunan pertanian di Kabupaten Kotawaringin Barat.



# BAB III

## Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan. dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang diukur dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja melalui laporan kinerja instansi pemerintah.

Laporan Kinerja 2023 ini menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran strategis untuk mengetahui tingkat keberhasilan. Indikator kinerja yang diukur adalah sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang telah dicapai. Pengukuran Laporan Kinerja 2023 mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	$\leq 50$	Sangat Rendah

# Capaian Kinerja Dinas Pertanian

Pada tahun 2023, Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Barat telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja terdapat 2 (dua) sasaran yang dicapai yang tersaji dalam tabel berikut ini:

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tahun 2023	Satuan	Realisasi Kinerja Sampai Dengan	Capaian Kinerja Sampai dengan bulan evaluasi
	DINAS PERTANIAN				TW IV	14= (10+11+12+13/4) *100%
1	Meningkatnya produksi komoditi pertanian	Jumlah Produksi Komoditi Pertanian (ton)	155.146,02	Ton	156.341,00	100,77
		Jumlah Produksi Komoditi Tanaman Pangan (ton)	11.707,32	Ton	6.645,00	56,76
		Jumlah Produksi Komoditi Hortikultura (ton)	32.352,83	Ton	37.707,00	116,55
		Jumlah Produksi Komoditi Perkebunan Rakyat (ton)	98.784,95	Ton	98.822,00	100,04
		Jumlah Produksi Komoditi Peternakan (ton)	12.300,93	Ton	13.167,00	107,04
2	Meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Aparatur/ Masyarakat	77	%	83,67	108,66

# Analisis Capaian Kinerja

Adapun hasil pengukuran dan capaian kinerja sasaran strategis diuraikan dibawah ini:

## Sasaran I: Meningkatnya Produksi Pertanian

Keberhasilan sasaran strategis 1 (satu) diukur dengan 1 (satu) indikator, dengan uraian sebagai berikut :

- Indikator Kinerja 1: Jumlah produksi komoditi pertanian, Perbandingan antara realisasi kinerja pada tahun 2023 dengan target indikator kinerja 1 yang tersaji dalam tabel berikut ini:

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya produksi komoditi pertanian	Ton	155.146,02	156.341,00	100,77
Jumlah Produksi Komoditi Tanaman Pangan (ton)	Ton	11.707,32	6.645,00	56,76
Jumlah Produksi Komoditi Hortikultura (ton)	Ton	32.352,83	37.707,00	116,55
Jumlah Produksi Komoditi Perkebunan Rakyat (ton)	Ton	98.784,95	98.822,00	100,04
Jumlah Produksi Komoditi Peternakan (ton)	Ton	12.300,93	13.167,00	107,04

## Capaian kinerja dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

Jumlah Produksi Tahunan Komoditi Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan) pada tahun 2023 secara rerata mengalami peningkatan melebihi target sasaran Renstra yaitu sebesar 100,77% walaupun di beberapa sub komoditi ada yang tidak mencapai target.

Produksi tanaman pangan pada tahun 2023 hanya mencapai 6.645 ton atau 56,76 % dari target yang ditetapkan sebesar 11.707,32 ton, hal ini disebabkan antara lain mundurnya pelaksanaan musim tanam Padi dan Jagung dari Musim April - September 2023 menjadi Oktober 2023 - Maret 2024 sehingga pencatatan produksi baru bisa dilakukan setelah panen yang diharapkan pada tahun 2024. Selain itu disebabkan curah hujan yang tinggi sepanjang tahun sehingga beberapa sentra produksi tanaman pangan seperti Desa Sebuai dan Desa Kubu tidak melaksanakan penanaman.



Komoditas hortikultura menunjukkan peningkatan produksi yang positif dengan kumulatif produksi mencapai 37.707 ton atau 116,55% dari target produksi sebesar 32.352 ton, hal ini disebabkan antara lain minat masyarakat yang cukup tinggi dalam budidaya hortikultura terutama cabai dan bawang merah terutama melalui program bantuan sarana produksi melalui pembiayaan APBN dan APBD serta beberapa komoditas buah-buahan seperti jeruk, buah naga dan semangka.

Peningkatan produksi perkebunan dari jumlah produksi komoditi perkebunan rakyat tahun 2023 yaitu 98.822 ton atau 100,04% dari target sebesar 98.795 ton. Hal ini disebabkan selain memang karena tingginya minat masyarakat dalam budidaya komoditi perkebunan terutama kelapa sawit serta kesadaran masyarakat yang mulai tinggi dalam penerapan Good Agricultural Practice (GAP) budidaya perkebunan terutama dari pemilihan benih/bibit, perawatan tanaman dan pasca panen,

Peningkatan produksi peternakan dari jumlah produksi komoditi peternakan tahun 2023 yaitu 13.167 ton atau 107,4% dari target sebesar 12.300 ton. Hal ini disebabkan selain memang karena tingginya minat masyarakat dalam budidaya komoditi peternakan seperti sapi, kambing, itik dan ayam melalui program bantuan sarana produksi melalui pembiayaan APBN dan APBD maupun swadaya dan ditunjang pula sudah berkurangnya wabah PMK (Penyakit Mulut dan Kuku) yang menyerang ternak. (Perhitungan secara rinci ada dalam lampiran)



Dari tabel lampiran di atas, jika capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir selama masa periode Renstra maka dapat ditunjukkan dengan tabel berikut ini:

JUMLAH PRODUKSI PERTANIAN	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	158.228	141.665	149.335	143.908	148.382	156.341
Jumlah Produksi Komoditi Tanaman Pangan (Ton)	19.514	10.249	14.691	7.437	11.212	6.645
Jumlah Produksi Komoditi Hortikultura (Ton)	32.095	26.930	29.948	30.547	30.986	37.707
Jumlah Produksi Komoditi Perkebunan Rakyat (Ton)	96.922	93.399	93.398	94.142	94.612	98.822
Jumlah Produksi Komoditi Peternakan (Ton)	9.695	11.086	11.296	11.781	11.571	13.167

Adapun perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah Renstra Dinas Pertanian Kab. Kotawaringin Barat disajikan pada tabel berikut ini:

NO	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja				Realisasi Kinerja				Capaian Kinerja (%)			
		1	2	3		4				5=(4/3)*100%			
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
I	Jumlah produksi komoditi pertanian	155.146	161.988	169.132	176.590	156.341				100,77			

## **Adapun analisis penyebab tercapainya kinerja adalah sebagai berikut:**

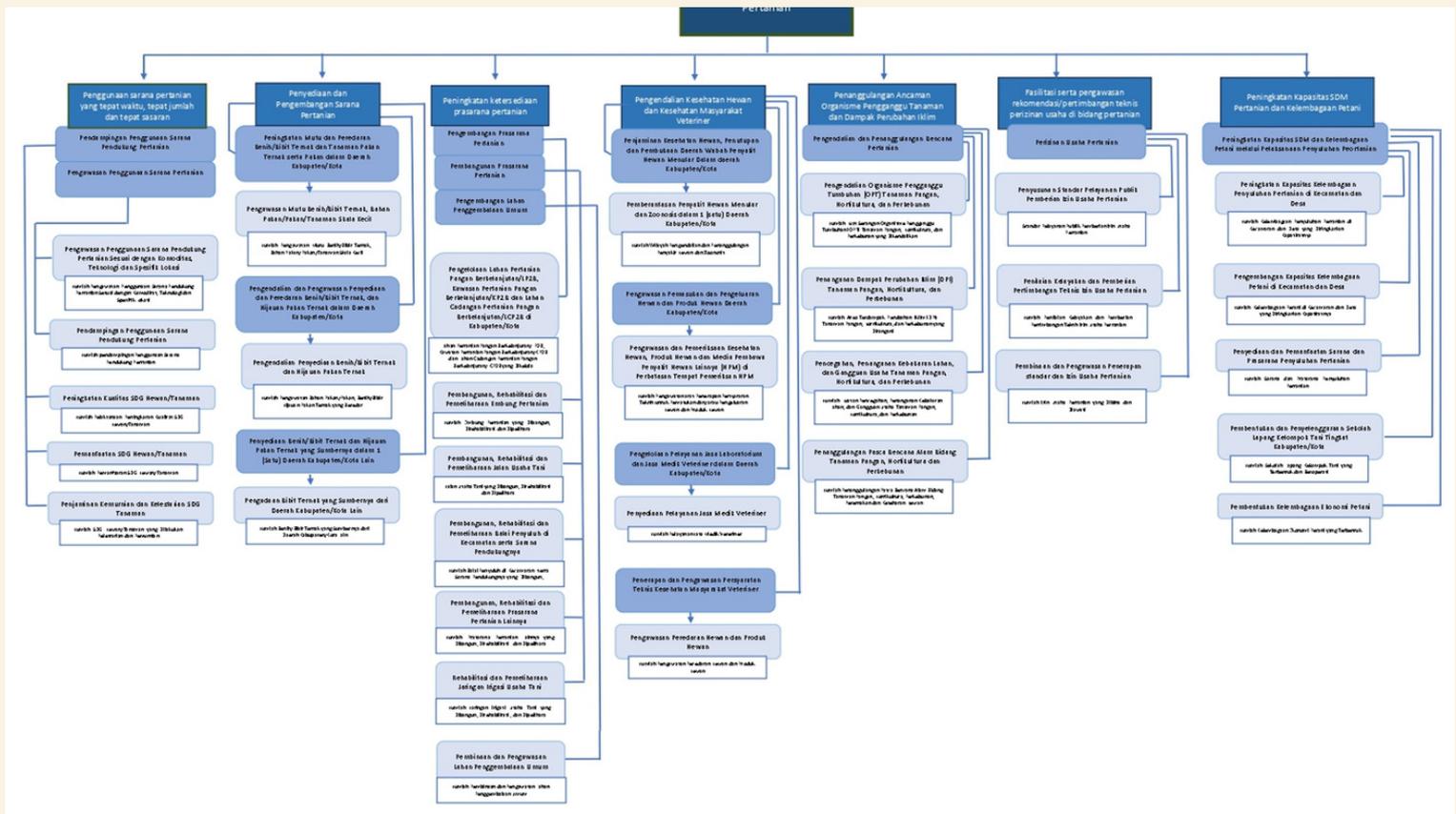
1. Dinas Pertanian melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai target kinerja yang telah ditentukan berpedoman kepada nomenklatur program kegiatan sesuai Permendagri nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. dimana pencapaian sasaran meningkatnya produksi pertanian dipengaruhi oleh beberapa komponen yaitu: ketersediaan sarana produksi pertanian berupa benih/bibit tanaman dan ternak, pupuk, pakan ternak dan HPT, obat-obatan pertanian dan obat-obatan kesehatan hewan, serta alat dan mesin pertanian. Sedangkan, dukungan ketersediaan infrastruktur berupa lahan, irigasi, jalan usaha tani/jalan produksi, bangunan penunjang pertanian (pintu air, dan parit, long storage/embung), pengendalian dan penanggulangan bencana OPT Pertanian serta pengendalian penyakit pada hewan dan ternak. perizinan usaha pertanian dalam rangka mendorong keikutsertaan swasta dalam pembangunan pertanian serta penyuluhan pertanian dalam peningkatan kapasitas pelaku usaha pertanian serta kelembagaan petani.
2. Ketersediaan sarana dan prasarana (pupuk, mekanisasi pengolahan lahan, sumber-sumber air yang tercukupi) baik dari swadaya petani maupun yang berasal dari bantuan yang bersumber dari APBD dan APBN bidang pertanian.
3. Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan melalui program Replanting tanaman perkebunan rakyat yang sudah tidak produktif dengan skema PSR dari BPPDKS Kementerian Pertanian
4. Berkurangnya gangguan hama dan penyakit tanaman serta penyakit ternak
5. Bertambahnya minat petani membudidayakan tanaman perkebunan dan hortikultura
6. Petugas Penyuluh Pertanian yang selalu siap dalam pendampingan dan peningkatan kapasitas petani dalam budidaya pertanian

Adapun analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan Dinas Pertanian melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai target kinerja yang telah ditentukan berpedoman kepada nomenklatur program kegiatan sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
5. Program Perizinan Pertanian
6. Program Penyuluhan Pertanian

Secara ringkasnya cascading program kegiatan dalam pencapaian sasaran meningkatnya produksi pertanian Pertanian dapat digambarkan melalui diagram sebagai berikut :

# Peningkatan Produksi Pertanian





Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari APBD yang mendukung pencapaian sasaran I adalah sebagai berikut:

## **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**

### **a. Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**

1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi, Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pengawasan penggunaan sarana pendukung pengembangan pertanian terutama untuk pupuk bersubsidi:
  - o Rapat/Pertemuan Tim KP3
  - o Rapat Tim Verval Pupuk Bersubsidi
  - o Monitoring Penyaluran Pupuk Bersubsidi Menggunakan Kartu Tani di 6 Kecamatan
2. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian, Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pendampingan kepada petani dan kelompok tani untuk penggunaan sarana pendukung pertanian terutama untuk alat dan mesin pertanian. Berikut kegiatan yang dilaksanakan :
  - o Pengadaan Sarana Pasca Panen Power Thresher Multi Guna 7 unit
  - o Pengadaan Sarana Pra Panen (Cultivator) 8 unit
  - o Pengadaan Traktor Roda 2 sebanyak 3 unit dan Traktor Roda 4 sebanyak 3 unit
  - o Fasilitasi CP/CL Alat Mesin Pertanian bantuan dari APBN
  - o Pendampingan Unit Pengelola Jasa Alsintan

### **b. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**

1. Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman
  - o Pemurnian Varietas Padi Lokal 1 Ha
  - o Pelepasan Varietas Buah Alpukat Lokal sebanyak 2 varietas
  - o Pengawasan dan Pembinaan, Kemurnian dan Kelestarian Plasma Nutfah
2. Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
  - o Pemeliharaan Kebun Induk Perkebunan 4 Ha
  - o Penangkaran Benih Padi di Balai Benih Tanaman Pangan 7 ha
  - o Operasional kegiatan di UPTD PPTU
  - o Monitoring Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
  - o Pembinaan Penangkar Benih/Bibit Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

### 3. Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman

- Pengembangan Jagung 66 Ha
- Pengembangan Padi Sawah 197 ha
- Pengembangan Hortikultura 3 unit
- Pengembangan Jeruk 2 kelompok tani
- Pengembangan Kelapa Sawit 40 Ha
- Pengembangan Kelapa Dalam 5 ha
- Pengembangan Kelapa Genjah 8 ha



#### c. Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota

1. Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
  - Operasional IB Swakarsa 1 tahun

#### d. Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota

1. Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
  - Pemurnian Varietas Padi Lokal 1 Ha
  - Pelepasan Varietas Buah Alpukat Lokal sebanyak 2 varietas
  - Pengawasan dan Pembinaan, Kemurnian dan Kelestarian Plasma Nutfah Unggul Lokal

#### e. Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain

1. Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
  - Pengadaan Ternak Sapi 162 ekor
  - Pengadaan Kambing PE 72 ekor
  - Pengadaan Itik 432 ekor
  - Pengadaan Ayam Buras 535 ekor



# PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

## a. Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian

1. Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B
  - o Tanggul Pertanian 2 unit di Desa Sumber Mukti
  - o Pemetaan Lahan LP2B, KP2B dan LCP2B di Wilayah Kecamatan Pangkalan Lada, Kotawaringin Lama dan Arut Utara

## b. Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian

1. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
  - o Swakelola Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier 6 unit
  - o Swakelola Irigasi Air Tanah 3 unit
2. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian
  - a. Pembangunan Embung Pertanian 1 unit
3. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
  - o Jalan Produksi /Jalan Usaha Tani 34 unit
4. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya
  - o Revitalisasi BPP Kumai 1 unit
5. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
  - o Pembangunan Gudang dan Alat Pengolah Pupuk Organik
  - o Renovasi PUSKESWAN 4 unit
  - o Pembangunan Gudang dan Alat RMU 1 unit



# PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER



## a. Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota

1. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
  - o Operasional pelayanan kesehatan hewan

## b. Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota

1. Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
  - o Operasional Check Point Amin Jaya dan Kumai dalam rangka pengawasan lalu lintas ternak dari luar daerah

## c. Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota

1. Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner
  - o Bimtek Pengendalian PMK 1 kali
  - o Operasional Pengendalian PMK (DAK Non Fisik) 1 tahun

## d. Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner

1. Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan
  - o Pertemuan Evaluasi Harga Pasar Produk Peternakan 2 kali
2. Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan
  - o Penyelenggaraan Pematangan Hewan Kurban
  - o Pengawasan dan Pembinaan Kesehatan Masyarakat Veteriner ke Peternak/Pelaku Usaha
3. Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis
  - o Operasional Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPHR) 1 tahun





- •
- •
- •
- •



## **PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**

- a. Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**
1. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
    - Pengadaan Bahan Kimia Pengendali OPT Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
    - Pengendalian OPT Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
  2. Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
    - Pemantauan Bencana Alam Pertanian
  3. Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
    - Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha



## **PROGRAM PERIZINAN PERTANIAN**

- a. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota.**
1. Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian
  2. Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian
  3. Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian



## **PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**

### **a. Kegiatan Penyuluhan Pertanian**

1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
  - Operasional BPP 6 Kecamatan
  - Pelatihan Tematik Pertanian 6 Kecamatan
  - Sosialisasi Geospasial 6 Kecamatan
  - Pengembangan Aplikasi Penyuluhan Pertanian SI TABBE
2. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
  - Pembinaan di 6 Kecamatan dan 81 Desa 14 Kelurahan Kelembagaan Petani (Kelompok Tani, GAPOKTAN, Asosiasi)
  - Keikutsertaan event PEDDA (Pekan daerah Petani dan Nelayan Andalan) dan PENAS (Pekan Nasional Petani dan Nelayan Andalan)
  - Penyusunan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok)
3. Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
  - Renovasi BPP 6 Kecamatan
  - Sarana dan Prasarana BPP 6 Kecamatan
4. Pembentukan Badan Usaha Milik Petani
  - Sosialisasi Pembentukan BUMP
5. Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota
  - Sekolah Lapang Peternakan Rakyat di 4 lokasi (Kumai, Kotawaringin Lama, Pangkalan Lada, dan Pangkalan Banteng)

# Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Standar Nasional

Dari capaian indikator kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Barat jika dibandingkan dengan capaian indikator nasional adalah jumlah produksi beberapa data komoditas strategis seperti Padi dan Jagung( Tanaman Pangan), Cabai dan Bawang Merah (Hortikultura), Kelapa Sawit (Perkebunan), Daging, Telur (Pernakan) adalah sebagai berikut :

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Capaian Nasional	Capaian Kobar	Prosentase %
1	Meningkatnya Produksi Pertanian	Jumlah Produksi Padi (ribu ton)	53.360	1,27	0,000024
		Jumlah Produksi Jagung (ribu ton)	14.460	0,97	0,000067
		Jumlah Produksi Cabai (ribu ton)	1.480	0,03	0,000022
		Jumlah Produksi Bawang Merah (ribu ton)	1.650	0,03	0,000019
		Jumlah Produksi Kelapa Sawit (Perkebunan Rakyat) (ribu ton)	9.364	84,17	0,008989
		Jumlah Produksi Daging (ribu ton)	4.134	10,52	0,002545
		Jumlah Produksi Telur (ribu ton)	6.100	2,47	0,000405

Secara keseluruhan untuk komoditi yang masih mendominasi adalah kelapa sawit dan daging baik daging ruminansia maupun unggas terlihat dari data proporsi yang paling besar dibandingkan dengan komoditi lainnya.

# Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi sumber daya terjadi apabila capaian kinerja telah memenuhi target atau melampaui target yang direncanakan ( $\leq 100\%$ ). Analisa efisiensi penggunaan sumber daya pada capaian kinerja keuangan dan kinerja indikator kinerja adalah sebagai berikut:

Sasaran	Indikator	Target Kinerja			Anggaran			Efisiensi %
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	
					(Rp)	(Rp)		
Meningkatnya Produksi Pertanian	Jumlah Produksi Komoditi Pertanian (ton)	155.146	156.341	100,770	33.549.960.153	31.504.753.509	93,904	6,866
<b>Total efisiensi anggaran</b>								<b>6,866</b>

Dari tabel tersebut di atas, efisiensi dapat dicapai karena:

1. Optimalisasi dari sisa lelang/pengadaan barang dan jasa
2. Optimalisasi pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka pembinaan petani dan kelompok tani melalui media social/daring.

Selain dari sisi anggaran, Dinas Pertanian juga mengembangkan kerja sama Lintas Sektoral. Optimalisasi kinerja silang manajemen kolaboratif lintas sektoral merupakan salah satu faktor pendukung dalam mencapai target kinerja. Adapun kegiatan yang dilaksanakan lintas sektoral adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Pihak Lain		Output	Manfaat
		Pihak	Kontribusi		
1	Penyusunan Data Statistik Produksi Pertanian	Dinas Komunikasi Statistik dan Persandian	Fasilitasi Pendampingan dan Pembuatan Aplikasi	Aplikasi SI TABBE	Mendukung pencapaian target kinerja peningkatan Produksi Pertanian
2	Pemetaan Lahan LP2B Kecamatan Pangkalan Lada, Kotawaringin Lama, dan Arut Utara	Dinas PUPR	Sinkronisasi dengan RTRW Kabupaten	Rancangan PERDA LP2B	
		BPN	Peta Lahan		
		KPHP	Peta Kawasan		

## Sasaran II : Meningkatkan Kualitas Layanan SKPD

Keberhasilan sasaran strategis 1 (satu) diukur dengan 1 (satu) indikator, dengan uraian sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Sasaran	Realisasi	Capaian Kinerja
					6 = (5/4*100%)
II	Indeks Kepuasan Aparatur/ Masyarakat Formulasi: Indeks Kepuasan Layanan Aparatur/ Desk Kuesioner ke SKM sesuai Permenpan 14 Tahun 2017	%	77	83,17	108,01%
<b>Capaian Kinerja Sasaran</b>					<b>108,01%</b>

Indeks Kepuasan Aparatur/Masyarakat merupakan indikator yang mengukur tingkat pelayanan Dinas Pertanian dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat sebagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi utamanya di bidang pertanian. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat/ Aparatur dilaksanakan melalui Aplikasi e SKM Kabupaten Kotawaringin Barat dengan sub layanan sebanyak 1 layanan kepada Masyarakat serta 1 layanan kepada aparatur antara lain sebagai berikut :

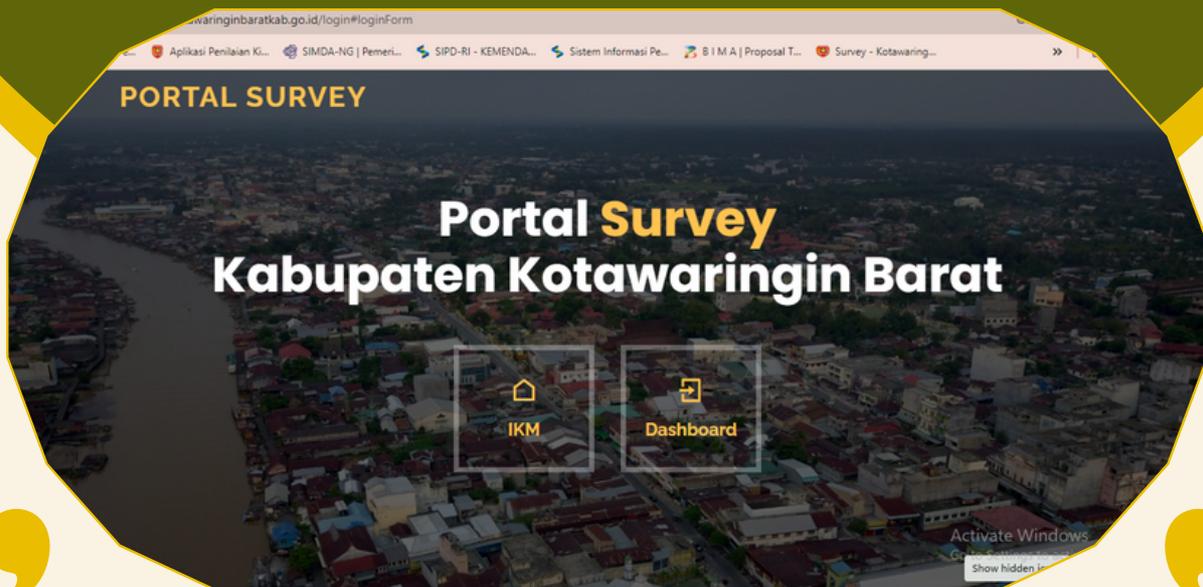
1. Layanan Pinjam Pakai ALSINTAN
2. Layanan Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) Pupuk Bersubsidi
3. Layanan Pendampingan Teknis Budidaya Pertanian
4. Layanan Pendampingan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT)
5. Layanan Pendampingan Promosi dan Pemasaran Hasil Pertanian
6. Layanan Pendampingan Sertifikasi Benih
7. Layanan Narasumber Pertanian
8. Layanan Data Informasi Pembangunan Pertanian
9. Layanan Konsultasi Agribisnis
10. Layanan Informasi Pasar Hasil Pertanian
11. Layanan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) Perkebunan
12. Layanan Kesehatan Hewan
13. Layanan Pemotongan Hewan UPT RPH (Rumah Potong Hewan)
14. Layanan IB (Inseminasi Buatan)
15. Layanan Pemeriksaan Kebuntingan (PKb)
16. Layanan Kesekretariatan Dinas

Sedangkan untuk penilaian Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Pertanian Tahun 2023 terdapat 9 unsur penilaian yaitu :

1. Persyaratan Pelayanan
2. Kemudahan Prosedur
3. Kecepatan Pelayanan
4. Kewajaran Biaya
5. Kesesuaian Produk Layanan
6. Kompetensi Petugas
7. Perilaku Petugas
8. Kualitas Sarpras
9. Penanganan Pengaduan

Dibawah ini tabel persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Pertanian Tahun 2023 :

No	UNSUR PELAYANAN	JUMLAH RATA-RATA	PERSENTASE %	MUTU PELAYANAN
1	Persyaratan Pelayanan	3.21	80.25	B
2	Kemudahan Prosedur	3.21	80.25	B
3	Kemudahan Prosedur	3.16	79	B
4	Kewajaran Biaya	3.71	92.75	A
5	Kesesuaian Produk Layanan	3.24	81	B
6	Kompetensi Petugas	3.30	82.5	B
7	Perilaku Petugas	3.33	83.25	B
8	Kualitas Sarpras	3.16	79	B
9	Penanganan Pengaduan	3.62	90.5	A
<b>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>			<b>83.17</b>	<b>BAIK</b>



Pada tahun 2023 target indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat/Aparatur sebesar 77% dengan capaian 83,17% dengan responden SKM sebanyak 557 orang dan prosentase capaian 108,01%.

Strategi/ Faktor yang mendukung keberhasilan peningkatan kinerja sebagai berikut :

1. Penyusunan Standar Pelayanan (SP) Dinas Pertanian secara rutin dikomunikasikan ke public melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) Standar Pelayanan Dinas Pertanian.
2. Kritik, masukan dan saran selalu ditindaklanjuti dalam upaya peningkatan pelayanan Dinas Pertanian kepada Masyarakat/aparatur
3. Adanya SDM dan sarana prasarana pada dinas sebagai pendukung upaya pencapaian target kinerja

# Realisasi Keuangan

Untuk melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2023 Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Barat mengalokasikan Belanja Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar Rp. 55.104.615.000 pada anggaran murni dan Anggaran Perubahan (DPPA) menjadi sebesar Rp 57.959.049.000. Penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan IV adalah sebesar Rp. 52.753.510.582 atau sebesar 91,02%. Data anggaran dan realisasi DPPA Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Barat untuk tahun anggaran 2023 disajikan pada tabel berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
<b>I</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>57.959.049.000</b>	<b>52.752.848.854</b>	<b>91,02</b>
<b>1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>50.326.754.192</b>	<b>45.456.323.179</b>	<b>90,32</b>
a	Belanja Barang dan Jasa	21.059.534.000	18.069.403.650	85,80
b	Belanja Pegawai	29.267.220.192	27.386.919.529	93,58
<b>2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>7.632.294.808</b>	<b>7.296.525.675</b>	<b>95,60</b>
a	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.239.309.973	2.222.166.380	99,23
b	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.392.984.835	5.074.359.295	94,09
<b>TOTAL</b>		<b>57.959.049.000</b>	<b>52.752.848.854</b>	<b>91,02</b>

Untuk rincian realisasi keuangan per kegiatan disajikan dalam tabel sebagai berikut:

<b>Uraian Belanja</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi Anggaran (Rp)</b>	<b>Capaian (%)</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>24.409.088.847</b>	<b>21.248.757.073</b>	<b>87</b>
<b>Kegiatan Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>116.823.500</b>	<b>115.045.232</b>	<b>98</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	75.186.000	73.501.732	98
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.960.000	1.960.000	100
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	2.800.000	2.800.000	100
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.572.500	2.572.500	100
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.700.000	2.700.000	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.825.000	2.825.000	100

<b>Uraian Belanja</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi Anggaran (Rp)</b>	<b>Capaian (%)</b>
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.780.000	28.686.000	100
<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>21.155.939.400</b>	<b>18.165.742.661</b>	<b>86</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21.059.534.000	18.070.065.378	86
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	37.540.400	37.434.736	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	58.865.000	58.242.547	99
<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>131.531.020</b>	<b>129.136.130</b>	<b>98</b>
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6.370.000	4.338.000	68
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	98.881.020	98.518.130	100
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	26.280.000	26.280.000	100

<b>Uraian Belanja</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi Anggaran (Rp)</b>	<b>Capaian (%)</b>
<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>212.840.000</b>	<b>197.121.629</b>	<b>93</b>
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	8.880.000	8.000.000	90
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	76.800.000	76.800.000	100
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	127.160.000	112.321.629	88
<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>639.070.189</b>	<b>626.112.162</b>	<b>98</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	46.063.346	40.348.700	88
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	114.641.489	114.174.000	100
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	32.450.255	29.243.430	90
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	87.007.099	86.798.210	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	358.908.000	355.547.822	99

<b>Uraian Belanja</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi Anggaran (Rp)</b>	<b>Capaian (%)</b>
<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>840.844.382</b>	<b>830.770.655</b>	<b>99</b>
Pengadaan Mebel	50.708.358	50.680.380	100
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	127.099.759	124.004.000	98
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	595.707.550	594.567.275	100
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	52.328.730	46.534.000	89
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.999.985	14.985.000	100
<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.016.345.856</b>	<b>907.887.654</b>	<b>89</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	700.000	99.000	14
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	318.857.456	261.191.323	82
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	696.788.400	646.597.331	93

<b>Uraian Belanja</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi Anggaran (Rp)</b>	<b>Capaian (%)</b>
<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>295.694.500</b>	<b>276.940.950</b>	<b>94</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.783.000	39.519.250	92
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	124.547.750	117.481.700	94
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	128.363.750	119.940.000	93
<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>11.232.663.157</b>	<b>10.523.388.123</b>	<b>94</b>
<b>Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>	<b>2.681.106.701</b>	<b>2.493.838.806</b>	<b>93</b>
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1.083.065.895	990.864.59	91
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1.598.040.806	1.502.974.216	94

<b>Uraian Belanja</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi Anggaran (Rp)</b>	<b>Capaian (%)</b>
<b>Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>4.707.120.447</b>	<b>4.249.957.555</b>	<b>90</b>
Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	1.674.341.235	1.457.373.946	87
Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	610.470.299	592.076.071	97
Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	2.422.308.913	2.200.507.538	91
<b>Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>207.715.000</b>	<b>207.366.000</b>	<b>100</b>
Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	207.715.000	207.366.000	100
<b>Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>106.311.600</b>	<b>102.086.662</b>	<b>96</b>
Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	106.311.600	102.086.662	96

Uraian Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
<b>Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain</b>	<b>3.530.409.409</b>	<b>3.470.139.100</b>	<b>98</b>
Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	3.530.409.409	3.470.139.100	98
<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	<b>14.682.527.260</b>	<b>13.940.584.931</b>	<b>95</b>
<b>Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	<b>2.009.087.800</b>	<b>1.530.682.621</b>	<b>76</b>
Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	1.050.022.800	1.019.911.498	97
Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	959.065.000	510.771.123	53
<b>Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian</b>	<b>12.644.759.460</b>	<b>12.383.746.310</b>	<b>98</b>
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	2.065.776.336	2.054.162.150	99

<b>Uraian Belanja</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi Anggaran (Rp)</b>	<b>Capaian (%)</b>
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	131.480.000	129.518.000	99
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	7.302.681.859	7.192.071.000	98
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	75.600.000	75.481.970	100
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	3.069.221.265	2.932.513.190	96
<b>Kegiatan Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum</b>	<b>28.680.000</b>	<b>26.156.000</b>	<b>91</b>
Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum	28.680.000	26.156.000	91
<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	<b>1.146.613.424</b>	<b>1.018.116.045</b>	<b>89</b>
<b>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>43.816.000</b>	<b>24.711.884</b>	<b>56</b>

Uraian Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	43.816.000	24.711.884	56
<b>Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>76.384.800</b>	<b>67.892.554</b>	<b>89</b>
Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	76.384.800	67.892.554	89
<b>Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>507.983.596</b>	<b>468.169.161</b>	<b>92</b>
Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	507.983.596	468.169.161	92
<b>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>	<b>518.429.028</b>	<b>457.342.446</b>	<b>88</b>
Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	10.604.800	8.236.000	78
Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	121.332.586	115.730.163	95
Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	386.491.642	333.376.283	86

<b>Uraian Belanja</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi Anggaran (Rp)</b>	<b>Capaian (%)</b>
<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	<b>438.542.042</b>	<b>387.740.265</b>	<b>88</b>
<b>Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</b>	<b>438.542.042</b>	<b>387.740.265</b>	<b>88</b>
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	155.167.042	133.627.640	86
Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	20.235.000	-	-
Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	13.140.000	13.112.000	100
Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	250.000.000	241.000.625	96
<b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>	<b>34.265.720</b>	<b>27.512.000</b>	<b>80</b>

<b>Uraian Belanja</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi Anggaran (Rp)</b>	<b>Capaian (%)</b>
<b>Penerbitan Izin UsahaPertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>34.265.720</b>	<b>27.512.000</b>	<b>80</b>
Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	9.475.720	7.220.000	76
Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	13.110.000	11.646.000	89
Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	11.680.000	8.646.000	74
<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>6.015.348.550</b>	<b>5.607.412.145</b>	<b>93</b>
<b>Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>	<b>6.015.348.550</b>	<b>5.607.412.145</b>	<b>93</b>
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	365.553.426	351.414.455	96
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	1.335.870.006	1.155.352.622	86
Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	4.257.130.000	4.053.353.950	95

<b>Uraian Belanja</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi Anggaran (Rp)</b>	<b>Capaian (%)</b>
Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	6.803.118	5.343.118	79
Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	49.992.000	41.948.000	84
<b>JUMLAH</b>	<b>57.959.049.000</b>	<b>52.753.510.582</b>	<b>91,02</b>

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja keuangan menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja keuangan tahun 2023 adalah sebesar **91,02%** yang berarti masuk dalam kategori capaian "**Tinggi**".

# BAB IV

## Penutup



Hasil laporan kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Barat tahun anggaran 2023 sebesar **104,72 %** dengan peringkat kinerja **sangat tinggi**.
2. Capaian kinerja keuangan **91,02%** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp.52.753.510.582** sehingga masuk dalam peringkat kinerja Tinggi

Beberapa **hambatan/permasalahan** yang dihadapi Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rangka pencapaian sasaran strategis Renstra dan pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Belum tertatanya kawasan pengembangan Pertanian dan Perkebunan yang telah sesuai dengan tata ruang wilayah, sehingga belum adanya kawasan yang terintegrasi secara spesifik dan terpadu untuk pengembangan Kawasan Pertanian dan Perkebunan secara Regulasi.
2. Kondisi prasarana dan sarana penunjang peningkatan produksi pertanian yang cukup terbatas.
3. Perubahan iklim yang tidak menentu menyebabkan kesulitan dalam penyusunan kalender tanam.

Untuk **meningkatkan kinerja** Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin, maka Dinas Pertanian berupaya untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Telah dilaksanakan focus pengembangan dan penguatan komoditas tanaman pangan sebagai komoditas pokok dan komoditas hortikultura sebagai penyangga inflasi dan alternatif untuk meningkatkan ekonomi melalui APBD dan APBN Tahun 2021.
2. Telah dilaksanakannya penyuluhan pertanian secara intensif baik secara luring dan daring ke kelompok tani/GAPOKTAN perihal GAP (Good Agriculture Practice) sebagai upaya peningkatan produksi dan produktivitas pertanian.
3. Dukungan anggaran untuk pelatihan manajemen ternak, pembinaan dan pendampingan penerapan tatacara budidaya ternak yang baik (GFP) baik ternak ruminansia dan ternak non ruminansia;
4. Telah dilaksanakan pendampingan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian ke kelompok pengolahan hasil pertanian
5. Telah dilaksanakan Replanting tanaman perkebunan rakyat yang sudah tidak produktif melalui skema PSR dari BPPDKS Kementerian Pertanian
6. Telah dilakukan Review RTRW serta regulasi penyelesaian tumpang tindih serta keterlanjuran perkebunan dalam areal kawasan hutan.

#### **Langkah-Langkah Perbaikan yang akan dilakukan ke depan**

1. Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM), baik kualitas maupun kuantitas dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Barat. Seperti halnya pada ketersediaan tenaga penyuluh yang mendukung disadari masih minim regenerasi dan akan terus membutuhkan tambahan SDM, selain itu juga dibutuhkan SDM yang lain untuk tenaga POPT, pengawas benih dan bibit pertanian, dan tenaga teknis lainnya yang mendukung upaya peningkatan produksi dan produktivitas Pertanian. Sebagai solusi atas hal tersebut maka Dinas Pertanian terus mengusulkan penambahan formasi tenaga-tenaga teknis yang diperlukan serta mengupayakan pemberdayaan serta peran serta swadaya masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan pertanian
2. Masih sulitnya mengimplementasikan penganggaran yang berbasis kinerja pada seluruh aparatur Dinas Pertanian. Sebagai solusi alternatif dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara periodik, selain itu juga diimplementasikan penilaian kinerja PNS melalui penerapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) serta dimonitor melalui aplikasi e Kinerja.
3. Belum optimalnya ketersediaan data yang ada di SKPD untuk menunjang proses perencanaan dan pengambilan kebijakan. Sebagai solusi alternatif direncanakan pada tahun 2024 akan dibangun sistem data base yang terpadu dan terintegrasi untuk menunjang proses perencanaan dan pengambilan kebijakan.

4. Indikator pada level impact dan Outcome pada umumnya bersifat fisik, sementara kegiatan yang dilaksanakan umumnya hanya dalam bentuk koordinasi atau non fisik, sehingga pencapaian pada level impact dan Outcome kadang sulit tercapai. Sebagai solusi alternatif bentuk koordinasi dan pembinaan kepada multipihak, serta turut melibatkan peran serta masyarakat dan swasta yang terkait dalam upaya pembangunan Pertanian akan ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Barat ini disusun, semoga bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.